

**Judul** : Belum ada regulasi Medsos, anak rentan terpapar konten negatif digital  
**Tanggal** : Minggu, 16 November 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

Belum Ada Regulasi Medsos

## Anak Rentan Terpapar Konten Negatif Digital

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Arif Rahman menilai (RUU) Perlindungan dan Keamanan Siber mendesak untuk dibahas. Pasalnya, hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang secara komprehensif melindungi anak dari paparan konten berbahaya di dunia maya.

"Saat ini banyak pengguna media sosial (medsos) usia dini yang berpotensi terpapar konten negatif dan ini dampaknya serius," ujar Arif dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).

Arif menilai, anak-anak Indonesia kini menjadi kelompok pengguna internet paling rentan. Banyak dari mereka bermain medsos tanpa pengawasan orang tua, sehingga mudah terpapar konten negatif seperti kekerasan, pornografi, hingga penipuan digital.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat, jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2025 mencapai 229,4 juta jiwa atau sekitar 80,66 persen dari total populasi. Dari jumlah itu, 48 persen merupakan remaja di bawah usia 18 tahun.

"Artinya, ruang siber kita sudah menjadi ruang bermain dan bela-

jar bagi anak-anak. Negara harus hadir memberi perlindungan," tegas Anggota Fraksi NasDem ini.

Sejumlah negara, ungkap Arif, sudah lebih dulu menerapkan regulasi ketat untuk melindungi anak dari dampak negatif medsos. Seperti Australia, melarang penggunaan Instagram dan Facebook bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Kemudian, Prancis mengharuskan platform digital memperoleh persetujuan orang tua sebelum anak di bawah 15 tahun membuat akun medsos. Inggris juga memiliki Undang-Undang Keamanan Daring (Online Safety Act) yang memperketat tanggung jawab platform digital terhadap konten berisiko bagi anak.

Di Filipina, tambah Arif, penggunaan medsos bahkan diwajibkan menggunakan nomor dan identitas resmi saat membuat akun untuk mencegah akun anonim yang bisa disalahgunakan. Dengan adanya fakta itu, Indonesia perlu segera memiliki undang-undang serupa agar upaya literasi digital yang digencarkan Pemerintah bisa berjalan seimbang dengan sistem perlindungan hukum yang kuat.

RUU Perlindungan Siber,



Arif Rahman

tambah dia, akan memperkuat penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang sudah resmi berlaku penuh pada Oktober 2024.

"Kalau anak-anak bisa dilindungi dari paparan negatif dan kebocoran data pribadi sejak dini, itu berarti kita sedang menyiapkan generasi digital yang sehat dan aman," kata Arif.

Senada, Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, mendorong Pemerintah dan DPR menyusun regulasi khusus berupa undang-undang yang dapat mem-

berikan perlindungan dan mencegah potensi kejahatan di ruang siber Indonesia. Sebab ada bahaya penyebaran informasi palsu yang kerap dilakukan oleh akun-akun anonim di dunia digital.

"Fraksi Gerindra ingin mengusulkan rancangan UU Perlindungan dan Keamanan Siber," kata Bambang dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).

Urgensi aturan tersebut, beber Bambang, juga bertujuan melindungi anak-anak dari paparan konten tidak bertanggung jawab. Selama ini banyak anak bermain medsos tanpa pengawasan orang tua, sehingga sangat rentan terhadap informasi yang menyesatkan.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR ini menyebut sejumlah negara telah menerapkan pembatasan medsos bagi anak-anak usia tertentu. Seperti Australia melarang penggunaan Instagram dan Facebook untuk anak di bawah 16 tahun. Lalu Prancis yang mengesahkan undang-undang yang mengharuskan platform mendapatkan persetujuan orang tua saat anak-anaknya di bawah 15 tahun membuat akun medsos.

Begitu juga Inggris dengan

UU Keamanan Daring. Juga Filipina yang mempunyai aturan mewajibkan pengguna medsos memakai nomor dan identitas resmi saat membuat akun untuk mencegah akun anonim.

Bambang mengingatkan, keterangan ahli medsos Ismail Fahmi dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR pada Senin (3/11/2025). Saat itu, Ismail menjelaskan fenomena *context collapse*. Artinya, ketika video yang benar dalam kasus ini anggota DPR berjoget di sidang tahunan ditumpuk dengan narasi tidak benar tentang kenaikan gaji sehingga menghasilkan hoax akibat framing yang menyesatkan.

Selain risiko hoax, tambah Bambang maraknya akun anonim juga memicu tingginya kasus penipuan di medsos. Karena itu, perlu adanya regulasi yang komprehensif untuk memperkuat perlindungan ruang digital Indonesia.

DPR ingin memastikan perlindungan siber bagi masyarakat. Langkah ini sebagai pencegahan untuk melindungi anak-anak.

"Juga mencegah munculnya akun anonim yang tak bertanggung jawab," pungkasnya. ■ TIF